

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada bulan Desember 2021, Provinsi NTB mengalami inflasi sebesar 0,63% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,04% (mtm). Tekanan inflasi di Provinsi NTB lebih tinggi dibandingkan nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,57% (mtm) dan capaian inflasi NTB historis selama 3 tahun (2018 - 2020) yang sebesar 0,43% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Provinsi NTB pada Desember 2021 tercatat sebesar 2,12% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,60% (yoy).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi pada bulan Desember 2021 bersumber dari inflasi Volatile Food (VF), Administered Price (AP), serta Core Inflation (CI). Kelompok VF pada Desember 2021 tercatat mengalami inflasi 1,89% (mtm) meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi 0,16% (mtm) yang didorong oleh meningkatnya harga komoditas hortikultura yaitu cabai rawit dan tomat serta kenaikan harga minyak goreng. Selanjutnya, kelompok AP juga tercatat mengalami inflasi 0,97% (mtm) meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 0,12% (mtm). Lebih lanjut inflasi AP juga didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara. Dari sisi kelompok CI juga terpantau mengalami inflasi sebesar 0,12% (mtm) yang juga meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,09% (mtm), yang utamanya disumbang oleh komoditas sepatu wanita.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Mengikuti Capacity Building TPID Se-Provinsi NTB bersama Kementerian Bidang Perekonomian Indonesia serta Kepala Daerah/SEKDA dari level Provinsi serta Kabupaten dan Kota di NTB ke Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli, Provinsi Bali pada tanggal 29 November s.d. 2 Desember 2021 sekaligus untuk membahas pembentukan KAD antara Kab/Kota Provinsi NTB dengan Kab. Badung dan Kab. Bangli

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Rapat TPID antar stakeholders harus lebih dilakukan berkala

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan rapat TPID yang lebih berkala